

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya pada bidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan. Tuntutan terhadap terciptanya good governance yang sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi asset.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting untuk ditingkatkan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah benar-benar dapat dikelola secara efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan (direncanakan). Hal itu, bersesuaian dengan amanah undang-undang di bidang keuangan negara yang membawa implikasi terhadap perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Prinsip ini hanya bisa dicapai jika seluruh penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pengendalian intern yang baik salah satunya adanya pemisahan fungsi yang terkait dengan jelas dan terstruktur dengan baik. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons

risiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Pengendalian akan lebih efektif, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 39 “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu Keandalan pelaporan keuangan, Efektivitas dan efisiensi operasi, dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” (IAI2, 2012). Pengendalian intern merupakan kegiatan yang meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian yang dilakukan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode, dan pelaksanaan kegiatan penjualan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar dan dapat menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas investasi. (Tjendera, 2005 dalam Elis & Siti, 2015).

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting untuk suatu perusahaan. Pengendalian internal dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan pengendalian dengan efektif dan berfungsi untuk mengawasi seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi pada perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, pimpinan perusahaan dalam hal manajer dapat mengendalikan kegiatan perusahaan dengan

baik. Selain itu, manajer juga dapat meyakinkan diri bahwa informasi yang terdapat dalam laporan diterima adalah benar dan dapat dipercaya.

Sumber keuangan yang paling utama di suatu daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom. Adapun pendapatan Asli daerah itu meliputi : a) Hasil Pajak Daerah; b) Hasil Retribusi Daerah; c) Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus terus menggali sumber-sumber PAD di daerahnya dengan semaksimal mungkin, mengelolanya sebaik mungkin, serta mengkaji atau mengevaluasi apakah sumber-sumber PAD tersebut sudah efektif, karena ada masyarakat yang sangat berharap kesejahteraannya terjamin oleh pemerintah.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki andil cukup besar sebagai sumber penerimaan PAD (Karina & Budiarmo, 2016). Pada pos pajak daerah, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pangsa 43,16 persen, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 23,16 persen, dan Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 13,14 persen.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Bapenda) Jawa Barat merupakan badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan aspek Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan peranan Bapenda dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal penerimaan sangat penting, maka diperlukan suatu pengendalian internal yang baik terhadap prosedur penerimaan kas, sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana pembangunan (Sumber: bapenda.jabarprov.go.id).

Bapenda dalam melaksanakan tugasnya serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membentuk cabang-cabang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Cabang-cabang pelaksana kebijakan dari Dinas Pendapatan Daerah dikenal dengan nama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD). Di Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi membentuk PPPD yang tersebar di 34 unit di seluruh Jawa Barat, salah satunya ialah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan.

Pendapatan pada Kantor Cabang Pelayanan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari:

1. Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Bermotor I (BBNKB I), Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Bermotor II (BBNKB II), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2. Retribusi Daerah: Jasa Usaha
3. PAD Lain-lain Yang Sah: Denda Pajak Daerah dan Pendapatan Dari Pemanfaatan Aset.

Adapun data pendapatan yang diperoleh dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yaitu sebagai berikut:

Table 1.1

**Data Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II
Kawalayaan Periode Tahun 2018-2020**

Tahun	Jenis Pendapatan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	423.572.000.000	433.175.809.700	102,27
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	237.604.000.000	236.338.427.000	99,47
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	4.626.000.000	4.927.947.000	106,53
	Pajak Air Permukaan (PAP)	326.690.000	396.167.230	121,27
2019	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	460.088.000.000	448.652.135.600	97,51
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	237.805.000.000	250.720.611.000	105,43
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	5.308.000.000	6.735.862.000	126,90
	Pajak Air Permukaan (PAP)	356.833.000	392.916.265	110,11
2020	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	492.673.426.000	420.454.525.950	85,34
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	126.376.000.000	160.024.590.300	126,63

	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	1.467.000.000	1.327.522.800	90,49
	Pajak Air Permukaan (PAP)	295.637.000	375.934.525	125,16

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh masih fluktuatif. Pendapatan yang diperoleh dari PKB setiap tahunnya mengalami penurunan, yang terendah terjadi pada tahun 2020 dimana hanya mencapai 85,34% dari target. Pada tahun 2019 pendapatan dari PKB, BBNKB I, dan BBNKB II mengalami kenaikan dibanding tahun 2018. Namun, Pendapatan dari PAP mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 diperoleh Rp396.167.230 sedangkan tahun 2019 sebesar R392.916.265.

Pada tahun 2018, penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) dibawah target yaitu sebesar Rp236.338.427.000 dari Rp237.604.000.000. Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibawah target yaitu sebesar Rp448.652.135.600 dari 460.088.000.000. Lalu, pada tahun 2020 penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) dibawah target yaitu Rp1.327.522.800 dari Rp1.467.000.000.

Virus Corona sempat memberikan pengaruh negatif kepada pendapatan Jawa Barat di sektor pajak kendaraan khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKN) baru dan bekas. Penurunan tajam terjadi ketika mulai diberlakukannya PSBB Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dimana biasanya per hari pendapatan di kawasan itu bisa mencapai 0,25-0,30% dari target

limbung menjadi hanya 0,16%, ditambah PSBB Bandung Raya pada bulan April – Mei pendapatan kian anjlok (Sumber: antaranews.com). Pada Januari - Maret sebelum pandemi, pendapatan mencapai Rp 707 miliar, kemudian turun menjadi Rp 631 miliar ketika pandemi mulai merebak. Bulan April - Mei dengan pendapatan terendah hanya mencapai Rp 470 miliar (Sumber: detik.com). Begitupun pendapatan pajak daerah di Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan mengalami penurunan akibat pandemi Corona. Hal tersebut bisa dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1

Pendapatan Tahunan Pajak Daerah di Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan

Berdasarkan Gambar 1.1 pendapatan dari pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,6% yakni dari Rp706.501.525.665 menjadi Rp582.182.573.575. Pendapatan tersebut masih dibawah dari target yang sudah ditentukan sebesar Rp620.812.063.000.

Dalam pengaturan sistem keuangan pemerintah, diperlukan adanya pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman. Salah satunya adalah Sistem Akuntansi Sektor Publik yang mencakup Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan saat ini telah banyak mengalami perkembangan, diikuti dengan adanya perubahan dasar hukum.

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas yang diterapkan masih mendata pajak kendaraan yang sudah mati, sehingga menyebabkan realisasi pendapatan dibawah target yang ditetapkan. Selain itu juga, terdapat kendala dimana saat input data penerimaan kas sistem Kembali ke halaman awal sehingga data yang sudah diinput tidak otomatis tersimpan.

Aktivitas penerimaan kas merupakan salah satu kegiatan perusahaan setelah memproduksi barang bagi perusahaan dagang dan memberikan jasa pelayanan bagi perusahaan jasa. Transaksi penerimaan kas menyebabkan aset perusahaan berupa kas atau setara dengan kas bertambah. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mengolah semua transaksi penerimaan kas. Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas akan berkaitan erat dengan penjualan tunai dan penjualan kredit, jika sistem tidak terstruktur dengan baik maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dibuat oleh perusahaan.

Untuk mempermudah kontrol, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan diperlukannya sistem untuk menyatukan bagian-bagian

perusahaan yang berhubungan dalam satu kesatuan manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki sistem yang sudah dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan. Sistem memiliki masukan dan keluaran atau hasil. Masukan dapat berupa informasi dan keluaran dapat berupa pengambilan keputusan.

Menurut Cushing (2008;17), Sistem Akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber – sumber modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dan pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Menurut Rama dan Jones (2008:09), Manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem akuntansi antara lain menghasilkan laporan eksternal seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Salah satu elemen yang paling penting dalam perusahaan adalah kas yang menentukan kontinuitas perusahaan terutama dalam membiayai jalannya operasional perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi pada perusahaan, diharapkan pimpinan mampu mengendalikan kinerja perusahaan. Oleh karenanya, pemimpin suatu perusahaan sangat membutuhkan suatu sistem dalam menjalankan pengendalian intern, agar dapat mengamankan atau mengawasi asset perusahaan.

Dengan diterapkannya pengendalian intern pendapatan yang didukung oleh sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang baik, diharapkan kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan dan tidak tercapainya target dapat diminimalkan. Selain itu juga akan menghasilkan laporan informasi akuntansi yang dapat dipercaya, sehingga mendorong

efisiensi usaha serta terus-menerus dapat memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang benar-benar dijalankan. Dengan demikian diharapkan akan terciptanya kelancaran operasional perusahaan guna usaha dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pengendalian internal yang baik, akan mendorong ditetapkan kebijakan manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif struktur pengendalian internal perusahaannya khususnya aktivitas penjualan. Kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan merugikan perusahaan sehingga menyebabkan sasaran penjualan tidak tercapai juga pendapatan akan berkurang. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian internal yang memadai terhadap aktivitas penjualan. Dikaitkan dengan sistem informasi akuntansi yang memadai diharapkan dapat menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan.

Pengendalian atas kas sangat penting bagi setiap perusahaan. Kas merupakan salahsatu aktiva yang sangat mudah digelapkan oleh seseorang, oleh sebab itu penerimaan dan pengeluaran atas kas menjadi lebih efektif dan efisien maka prosedur prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan harus dibuat sebaik mungkin. Menurut Krismiaji (2002;217) sumber daya informasi pada sebuah organisasi harus menjadi prioritas utama manajemen puncak dan harus terdapat pencapaian dan pengamanan. Oleh sebab itu sistem akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran kas sangat dibutuhkan untuk mempermudah tercapainya tujuan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat topik tersebut ke dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi adanya masalah yaitu:

1. Pendapatan pajak daerah yang masih fluktuatif.
2. Pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,6% akibat adanya pandemi corona.
3. Pendapatan yang diperoleh dari PKB setiap tahunnya mengalami penurunan.
4. Masih kurangnya wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak kendaraan.
5. Setiap tahunnya terdapat jenis penerimaan pajak yang tidak memenuhi target.
6. Sistem yang digunakan masih mendata pajak kendaraan yang sudah mati.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis akan

memfokuskan pada sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengendalian intern penerimaan kas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.
2. Bagaimana pengendalian intern penerimaan kas pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.
3. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi penerimaan kas terhadap pengendalian intern penerimaan kas pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Intern Penerimaan Kas ”.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.
2. Pengendalian intern penerimaan kas pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.
3. Besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi penerimaan kas terhadap pengendalian intern penerimaan kas pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang selama ini diterapkan, dan bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan kas dijalankan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dalam memahami bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan sistem pengendalian penerimaan kas dijalankan.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.
3. Bagi pihak lain dapat digunakan sebagai bahan informasi dan

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan dan dunia usaha.

